

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT
PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)



Skripsi Oleh

ENTI FIRANTI

01031181320087

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT
PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)

Disusun Oleh:

Nama : Enti Firanti
Nim : 01031181320087
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 25 Januari 2017

Ketua: 
Drs. H. Harun Delamat, M. Si., Ak

NIP : 195501131990031002

Tanggal: 21 Januari 2017

Anggota: 
Hj. Relasari, SE., M. Si., Ak

NIP : 197206062000032001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT
PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)

Disusun Oleh:

Nama : Enti Firanti

NIM : 01031181320087

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 13 Maret 2017 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 13 Maret 2017

Ketua



Drs. H. Harun Delamat, M. Si. Ak
NIP. 19550113 199003 1 002

Anggota



Hj. Relasari, SE., M.Si., Ak
NIP. 19720606 200003 2 001

Anggota



Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 19660820 199402 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, SE., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Enti Firanti
NIM : 01031181320087
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran,
Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan
Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Harun Delamat, M. Si. Ak
Anggota : Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 13 Maret 2017

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 13 Maret 2017
Pembuat Pernyataan



Enti Firanti
Nim : 0103118320087

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Enti Firanti
NIM : 01031181320087
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 13 Maret 2017

Pembimbing Skripsi

Ketua,

Anggota,

Drs. H. Harun Delamat., M.Si., Ak.
NIP.195501131990031002

Hj. Relasari, SE., M.Si., Ak
NIP.197206062000032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Kecil disayang
- Muda Terkenal
- Tua kaya raya
- Mati Masuk Surga
- Do the best and be the best but don't feel the best
- Usaha dan doa sama banyak

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Firdaus dan Ibu Toyibatul Fitriah
2. Adik adikku Annisa Pratiwi dan Aisyah Firdayanti dan nenek nenek ku tercinta
nenek Halawatiah dan nenek Zaimah.
3. Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya sebagai penulis skripsi dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang tahun 2013-2015.

Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi berkat bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka penulis meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut dan menerima kritik serta saran yang membangun.

Palembang, 13 Maret 2017

Enti Firanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik moril maupun materil. Karenan itulah, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha segalanya, yang tiada henti memberikan nikmat, rahmat dan pertolongan.
2. Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi panutan bagi seluruh umat manusia di dunia.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff . MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya
6. Abukosim, S.E.,M.M.,Ak Selaku Pembimbing Akademik
7. Drs. H. Harun Delamat, M.Si.,Ak Selaku dosen ketua pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Skripsi ini.
8. Hj.Relasari,SE.,M.Si.,Ak. Selaku dosen anggota pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Skripsi ini

9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staff kepegawaian Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Ekonomi.
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan Tugas Akhir Skripsi ini dan memberikan arahan mengenai perpajakan
13. Kedua orang tua ku tercinta, Firdaus dan Toibatul Fitriah yang telah membimbing, memotivasi, dan mendoakan ku dengan penuh cinta, kasih dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Terima kasih atas semua doa dan kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan yang membawaku hingga sampai pada tahap ini.
14. Adik adikku tercinta Annisa Pratiwi dan Asiyah firdayanti yang selalu memberi semangat selama menempuh skripsi ini.
15. Kedua nenek nenek ku tercinta nenek halawatiah dan nenek zaimah yang selalu membantu mendoakan dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besarku wak herman, wak darwin, wak cek, mang ujang, mang iwan, bibi tini dan bibi sarinten serta sepupu sepupuku.

17. Teman teman Akuntansi angkatan 2013, semoga kita selalu kompak dan selalu sukses dimasa depan.
18. Teman – teman Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya yang telah bersama-sama mengukir pengalaman berorganisasi dan menjadi keluarga baru di dunia kampus.
19. Teman teman sepermainan selama kuliah, anak-anak genk Gincu, Alifah yang selalu menenangkan ketika saya lelah dan selalu menjadi pendengar yang baik,Intan, Aries, Siska, Yuli, Sapta, Mifta, Vera, dan Amik yang telah memberikan doa, canda tawa, semangat, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Muhammad Aldo,S.Kom yang telah memberikan semangat, bantuan dan motivasi terus menerus dalam menyelesaikan Skripsi ini.
21. Teman selama SMA Amelia dan Silvi selalu memberikan canda tawa, semangat, motivasi dan doa dan juga sama sama berjuang skripsi di fakultas masing masing.
22. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, bantuan dari semuanya sungguh berarti

Inderalaya,13 Maret 2017
Penulis

Enti Firanti

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tahun 2013-2015)

Oleh:
Enti Firanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang tahun 2013-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Data penelitian yang di peroleh dianalisis dengan menggunakan rasio.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan surat teguran tergolong tidak efektif, penagihan dengan surat paksa tergolong kurang efektif dan penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan tergolong sangat efektif akan tetapi penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang tahun 2013-2015.

Pimpinan KPP Madya Palembang sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Pihak KPP Madya Palembang dapat mengadakan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, dan untuk bagian penagihan agar lebih tegas dalam penagihan terhadap wajib pajak.

Kata Kunci: efektivitas, kontribusi, pengihan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan.

Ketua Pembimbing,

Drs. H. Harun Delamat., M.Si., Ak.
NIP.195501131990031002

Anggota,

Hj. Relasari, SE., M.Si., Ak
NIP.197206062000032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

Effectiveness and Contribution of Active Tax Collection Action with Reprimand Letter, Forced Letter and Confiscation Letter of Tax Revenue. (Research at Tax Office Madya Palembang in 2013-2015)

By:

Enti Firanti

Drs. H. Harun Deamat, M.Si.,Ak.,Ca

Hj.Relasari,SE.,M.Si.,Ak

The purposes of this research are to determine the effectiveness and contribution of active tax collection on the Reprimand Letter, Forced Letter and confiscation letter of tax revenue at tax office Madya Palembang in 2013-2015. The analysis method used in this research is comparatiave descriptive analysis . The research data obtained were analyzed using the ratio.

The results showed that active tax collection with reprimand letter is not effective, with forced letter is effective enough and with confiscaion letter is very effective but active tax collection by using reprimand letters, forced letter and confiscation letter giving a very small contribution in the income of Tax revenue at tax office (KPP) Madya Palembang in 2013-2015.

The leader at KPP Madya Palembang should increase the effectivity of the warning letter and forced letter so that the tax income could increase. KPP Madya Palembang could hold a socialization about the importance of paying taxes so that the tax payers could know the importance of paying taxes, and so that the tax collector could be firmer in collecting the taxes from the tax payers.

Keywords: effectiveness, contribution, tax collection, warning letter, forced letter, confiscation letter.

Ketua Pembimbing,



Drs.H.Harun Delamat.,M.Si., Ak.
NIP.195501131990031002

Anggota



Hj.Relasari,SE.,M.Si.
NIP.197206062000032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Enti Firanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 September 1995

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Tinggi / Berat Badan : 160cm / 60 kg

Alamat Rumah (Orangtua) : Sekip Bendung. Lr. Lomba Jaya 1. RW.26
Rw.07 No.1657 Kec. Kemuning Kel.20 Ilir DII.
Palembang Sumatera Selatan.

Alamat Email : entifiranti04@gmail.com

Telpon : 089627408469

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SD Negeri 177 Palembang

SLTP : SMP Negeri 10 Palembang

SLTA : SMA Negeri 15 Palembang

Pendidikan Non Formal : - Gloria English Course
- Kursus LAMI komputer
- Kursus Akuntansi Prospek

Pengalaman Organisasi : - Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi

Kemampuan : - Bahasa Inggris
- Microsoft Office & Myob



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Statistika Penulisan..... | 10 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | 12 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka..... | 12 |
| 2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan..... | 12 |
| 2.1.2 Pengertian Pajak..... | 13 |
| 2.1.3 Fungsi Pajak..... | 14 |
| 2.1.4 Jenis Jenis Pajak..... | 15 |
| 2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 16 |
| 2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.7 Utang Pajak..... | 19 |
| 2.1.7.1 Munculnya Hutang Pajak..... | 20 |
| 2.1.7.2 Berakhirnya Hutang Pajak..... | 20 |
| 2.1.8 Efektivitas..... | 21 |
| 2.1.9 Penagihan Pajak..... | 22 |
| 2.1.9.1 Pengertian Penagihan..... | 22 |
| 2.1.9.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak..... | 23 |
| 2.1.9.3 Tindakan Penagihan Pajak..... | 25 |
| 2.1.9.4 Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak..... | 26 |
| 2.1.9.5 Penagihan dengan Surat Teguran..... | 27 |
| 2.1.9.6 Penagihan dengan Surat Paksa..... | 30 |
| 2.1.9.7 Penagihan dengan SPMP..... | 34 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 37 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 39 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Jenis Data..... | 41 |
| 3.1.1 Data Primer..... | 41 |
| 3.1.2 Data Sekunder..... | 41 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 42 |
| 3.4 Metode Analisis Data..... | 43 |
| 3.5 Teknik Analisis Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 4.1 Gambaran Umum KPP Madya Palembang..... | 46 |
| 4.1.1 Sejarah Pembentukan..... | 46 |
| 4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai..... | 48 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi..... | 49 |
| 4.1.4 Pokok Sub Bagian dan Seksi..... | 50 |
| 4.1.5 Wilayah Kerja..... | 54 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 55 |
| 4.2.1 Penyajian Data..... | 55 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak..... | 55 |
| 4.2.1.2 Target & Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran | 57 |
| 4.2.1.3 Target & Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa... | 58 |
| 4.2.1.4 Target & Realisasi Penerimaan Pajak dengan SPMP..... | 59 |
| 4.2.2 Analisis Data..... | 60 |
| 4.2.2.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran..... | 60 |
| 4.2.2.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa..... | 62 |
| 4.2.2.3 Efektivitas Penagihan Pajak dengan SPMP..... | 64 |
| 4.2.2.4 Kontribusi Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak..... | 66 |
| 4.2.2.5 Kontribusi Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak..... | 68 |
| 4.2.2.6 Kontribusi SPMP Terhadap Penerimaan Pajak..... | 69 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 72 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 72 |
| 5.2 Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Surat Teguran Surat Paksa dan SPMP yang Terbit..... | 7 |
| Tabel 4.1 Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang..... | 56 |
| Tabel 4.2 Penerbitan Surat Teguran..... | 57 |
| Tabel 4.3 Penerbitan Surat Paksa..... | 58 |
| Tabel 4.4 Penerbitan SPMP..... | 59 |
| Tabel 4.5 Efektivitas Surat Teguran di KPP Madya Palembang..... | 60 |
| Tabel 4.6 Efektivitas Surat Paksa di KPP Madya Palembang..... | 62 |
| Tabel 4.7 Efektivitas SPMP di KPP Madya Palembang..... | 64 |
| Tabel 4.8 Kontribusi Surat Teguran di KPP Madya Palembang..... | 66 |
| Tabel 4.9 Kontribusi Surat Paksa di KPP Madya Palembang..... | 68 |
| Tabel 4.10 Kontribusi SPMP di KPP Madya Palembang..... | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 40 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang..... | 50 |
| Gambar 4.2 Peta Wilayah Kerja DJP Sumsel & kep.Babel..... | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Riset
2. Surat Keterangan Penelitian.....
3. Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP yang terbit dan cair
4. Penerimaan Pajak Tahun 2013.....
5. Penerimaan Pajak Tahun 2014.....
6. Penerimaan Pajak Tahun 2015.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh–sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Hal ini dibuktikan dalam APBN tahun 2015 yang membuktikan bahwa penerimaan negara di sektor perpajakan berkontribusi sebesar Rp. 1.270,82 triliun, atau sebesar 77,79% dari total pendapatan negara. Dengan kontribusi sebesar itu, pemerintah terus memanfaatkan potensi pajak.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah menjadi peran masyarakat atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan Negara. Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam pengaplikasiannya, *self assessment system* juga memiliki kekurangan yaitu *self assessment system* dapat memungkinkan wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu, pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus mempunyai peran yang besar bagi meningkatnya penerimaan pajak, namun pada kenyataannya cukup banyak masyarakat atau wajib pajak dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan atau kelalaian dalam membayar pajak yang telah ditetapkan.

Masalah-masalah yang kemungkinan timbul akan memberi implikasi yang sangat serius terhadap penurunan penerimaan pajak, sehingga tidak dapat untuk memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan. Adapun suatu alternatif dalam memenuhi target adalah yang mengoptimalkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya dalam pajak yang terutang, namun hal ini tidak serta merta ditujukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan aparat perpajakan.

Pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak.

Selain pemeriksaan pajak ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Komara, 2012:112). Penagihan pajak dilakukan karena masih

banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Tindakan penagihan dapat berupa penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Sedangkan Penagihan Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang – Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. Seperti pada penelitian Revvica, Suhadak dan Nila (2014) tentang analisis efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Malang Selatan tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas penagihan dengan surat paksa selama kurun waktu 2012-2014 rata rata dapat dikatakan kurang efektif dan tidak efektif. Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak memperlihatkan bahwa kontribusi yang diberikan dari realisasi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa tergolong rendah.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu, dan bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Fenomena kepatuhan pajak di hingga tahun 2015 cukup menjadi sorotan, sampai diadakannya program Amnesti Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang adalah Kantor Pelayanan Pajak terbesar yang ada di kota Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang penerimaan pajaknya berubah ubah tidak stabil setiap tahunnya. Seiring dengan penerimaan pajak yang berubah ubah setiap

tahunnya tentu saja mempunyai tingkat tunggakan pajak atau hutang pajak yang naik turun besarnya setiap tahun sesuai besar pula setiap tahunnya. Yang artinya Terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan/ hutang pajak.

Hal ini dapat terlihat dari presentase realisasi penerimaan di KPP Madya Palembang selama beberapa tahun terakhir yang masing masing mencapai target sebesar 96% pada tahun 2010, untuk tahun 2011 mencapai target 97%, pada tahun 2012 mencapai target 92% dan mengalami penurunan target menjadi 72,47% pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 sangat melebihi target yakni sebesar 100,7% dan pada tahun 2015 yakni hanya 73,37% dari target. Salah satu faktor yang menopang tinggi atau rendahnya tingkat presentase realisasi penerimaan tersebut adalah penagihan pajak secara aktif.

KPP Madya Palembang juga mengupayakan pencapaian target penerimaannya melalui kebijakan dengan cara penagihan pajak secara aktif dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan guna mengawasi kepatuhan ajak sehingga tercapainya penerimaan pajak yang sesuai dan terarah. Hal ini dilakukan karena melihat jumlah surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang naik turun dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Seperti pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1**Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP yang terbit di KPP Madya Palembang 2013-2015**

| Tahun | Bulan | Surat Teguran yang Terbit | Surat Paksa yang Terbit | SPMP yang Terbit |
|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2013 | Januari | 142 | 7 | - |
| | Februari | 126 | 111 | 4 surat |
| | Maret | 117 | 29 | - |
| | April | 368 | 21 | 3 Surat |
| | Mei | 124 | 49 | - |
| | Juni | 56 | 95 | - |
| | Juli | 96 | 19 | 1 Surat |
| | Agustus | 89 | 32 | - |
| | September | 34 | 100 | - |
| | Oktober | 66 | 102 | 1 surat |
| | November | 92 | 98 | - |
| | Desember | 47 | - | - |
| | Jumlah | 1357 | 663 surat | 9 Surat |
| 2014 | Januari | 23 | 16 | - |
| | Februari | 222 | 40 | - |
| | Maret | 201 | 116 | 10 Surat |
| | April | 255 | 32 | - |
| | Mei | 76 | 66 | 2 Surat |
| | Juni | 41 | 30 | - |
| | Juli | 17 | 38 | 4 surat |
| | Agustus | 149 | 16 | - |
| | September | 56 | 47 | 7 surat |

| | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Oktober | 78 | 34 | 5 Surat |
| | November | 50 | 5 | 4 Surat |
| | Desember | 38 | 2 | 1 Surat |
| | Jumlah | 1206 surat | 442 surat | 33 Surat |
| 2015 | Januari | 90 | 15 | - |
| | Februari | 57 | 16 | - |
| | Maret | 112 | 142 | 37 Surat |
| | April | 58 | 34 | 60 Surat |
| | Mei | 97 | 62 | 97 Surat |
| | Juni | 146 | 84 | 7 Surat |
| | Juli | 78 | 109 | 14 Surat |
| | Agustus | 183 | 23 | 7 Surat |
| | September | 74 | 103 | 11 Surat |
| | Oktober | 106 | 56 | 40 Surat |
| | November | 175 | 77 | 34 Surat |
| | Desember | 135 | 0 | - |
| | Jumlah | 1311 | 721 | 307 Surat |

Dilihat dari tabel diatas jumlah tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran cenderung jauh lebih banyak di bandingkan dengan Surat Paksa dan SPMP walaupun naik turun setiap tahunnya. Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan dilakukannya Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini bertujuan agar wajib pajak dapat segera

membayar utang pajaknya sehingga diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak di KPP Madya Palembang. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Palembang tahun 2013 sampai 2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan sudah efektif terhadap penerimaan pajak?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan di kantor pajak mengenai penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah di peroleh dan di plajari selama masa perkuliahan serta menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal penerimaan pajak melalui penagihan pajak aktif.
- b. Bagi Akademis, Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

1.5 Statistika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran secara garis besar dan jelas mengenai penyusunan skripsi secara keseluruhan sehingga hubungan antara bab 1 dengan bab yang lain. Secara

sistematis isi dari pembahasan dalam masing masing bab tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis mengungkapkan beberapa teori teori dasar yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan penulis bahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jeenis data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, metode pengolahan data, teknik analisis data yang digunakan penuis untuk menyelesaikan penelitian ini

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tetang gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian dan pemcahan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB II KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Disini penulis akan mencoba mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Sanusi Anwar. 2011. *Metodelogi penelitian bisnis*. Salemba empat. Jakarta
- Hadi,Moeljo.2001. *Dasar dasar penagihan pajak dengan surat paksa oleh juru sita pajak maupun daerah*. Raja grafindo persada. Jakarta
- Waluyo. 2013. *Perpajakan*. Salemba empat. Jakarta
- Resmi siti. 2014. *Perpajakan teori dan kasus*. Salemba empat. Jakarta
- Halim abdul, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2016. *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus*. Salemba empat. Jakarta.
- Sudirman rismawati dkk. 2015. *Perpajakan pendekatan teori dan praktek*. Empat dua media. Malang Jawa Timur
- Komara,Ahmad. 2012. *Cara mudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) perpajakan*. Bee media Indonesia consulting group. Jakarta.
- Sutrisno budi, Rina Arifati, Rita Andini. 2016. *Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang*. Journal of accounting. Volume.2 No.2
- Prastowo,Yustinus. 2009. *Materi Lengkap Panduan Lengkap Pajak*. Ria asah sukses. Bogor
- Ilyas wirawan dan Burton. 2011. *Hukum pajak edisi 5*. Salemba empat. Jakarta
- Pudyatmoko,sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak edisi terbaru*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Departemen keuangan Republik Indonesia.2000. *Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor 561/KMK.04/2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa*.
- Departemen keuangan reublik Indonesia.2010. *Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia nomor 24/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan dan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia no 85/PMK.03/2010*.

- Republik Indonesia.2000.*undang undang no 19 tahun 1997 tentang penagihan penagihan dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang no 19 tahun 2000.*
- Republik Indonesia.2000. *undang undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengann undang undang no 28 tahun 2007.*
- Marduati,andi. 2012. *Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di kanor pelayanan pajak pratama Makasar barat.* Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Hasanudin Makasar.
- Revvica suhadak dan nila. 2015. *Analisis efektifitas pen agihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.* Jurnal adminisitrasi bisnis perpajakan (JAB) vol.16 no.1.
- Ritonga, Pandapotan. 2012. *Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur.* Jurnal saintikom. Vol 11, No.3
- Muda, Harza, Sifrid dan Victoria. 2015. *Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dampaknya terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bitung.* Jurnal EMBA vol 3 No 4.
- Muhammad Rizki Nindar, Sifrid Pangemanan dan Harijanto Sabijono (2014). *Efektifitas penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado.* Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, hal 1-10.
- Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid, Mochammad Djudi. 2014. *Pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Singosari.* Jurnal perpajakan. Vol.3 No.1 Desember 2014.